

ANALISIS RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK MENILAI KECUKUPAN MODAL BANK DALAM MENDUKUNG KEGIATANNYA SECARA EFISIEN

(Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat yang Berkantor Pusat
di Kabupaten Lumajang Periode 2007 – 2009)

Oleh :

Ninik Lukiana

STIE Widya Gama Lumajang

1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENELITIAN

Bank pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*defisit unit*) serta lembaga yang memperlancar arus lalu lintas pembayaran. Bank juga lembaga kepercayaan yang disamping berfungsi sebagai lembaga intermediasi juga sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang moneter. Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia ditempuh antara lain dengan cara menyederhanakan jenis bank serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan. Melalui upaya ini diharapkan perbankan dapat lebih meningkatkan peranannya dalam melaksanakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia sejak tahun 1988, sudah ada sejenis bank yang memiliki karakteristik operasional spesifik yang memungkinkan untuk menjangkau dan melayani usaha mikro dan kecil yaitu Bank Perkreditan Rakyat dan diatur dalam undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dimana Bank Perkreditan Rakyat diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank

umum. Selanjutnya diperkuat dengan PP No.71 Tahun 1992 khusus tentang Bank Perkreditan Rakyat, dimana Bank Perkreditan Rakyat diberikan kejelasan status dan pembinaan serta diarahkan agar dapat memperluas jangkauan pelayanannya dan kepastian berusaha disegala pelosok tanah air. Keunikan Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan keunggulannya dibandingkan bank umum adalah prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat dan peraturan kredit yang fleksibel. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat juga unggul dalam pelayanan kepada nasabah yang mengutamakan pendekatan personal dan jempit bola.

Kinerja (*performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kecukupan modal bank merupakan tolak ukur atau penilaian terhadap kecukupan modal bank menurut Bank Indonesia dengan hasil apakah bank tersebut mempunyai kecukupan modal minimum dan maksimum dalam mencukupi likuiditasnya, atau di bawah pengawasan Bank Indonesia ataukah bank tersebut harus dilikuidasi. Analisis tentang kecukupan modal bank yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia adalah dengan mengukur tingkat keuangan dan manajemen dari laporan keuangan bank yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan rugi/laba dan laporan posisi keuangan.

Di Indonesia hanya beberapa bank saja yang memenuhi kriteria permodalan yang berlaku karena sebagian besar tingkat rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) dari bank-bank yang ada dibawah batas 4% (sesuai dengan keputusan Bank Indonesia No. 28/64/K-EP/DIR tanggal 7 September 1995 dan minimal 8% dari nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) sampai dengan akhir tahun 2001) dan bahkan banyak yang negatif. Perkembangan standar CAR yang ditetapkan Bank Indonesia senantiasa mengalami perubahan, mengikuti perkembangan dan kebutuhan perbankan nasional.

Topik bahasan pada penelitian ini adalah tentang kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang yang laporan keuangannya sudah dipublikasikan pada periode 2007 – 2009, ditinjau dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPM). Bank Perkreditan Rakyat di Lumajang ini menarik untuk diteliti kinerjanya karena perkembangannya cukup pesat dan untuk mengetahui apakah Kecukupan Modal Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut : ”Bagaimana kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatannya secara efisien ditinjau dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang periode 2007 – 2009.”

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatannya secara efisien ditinjau dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang periode 2007 – 2009.”

2. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Bank Perkreditan Rakyat

Dalam cetak biru Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (2006) menjelaskan tentang posisi Bank Perkreditan Rakyat dalam sistem keuangan di Indonesia sebagai berikut:

a. Landasan Hukum dan Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditunjukkan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BPR dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

b. Lingkup Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan usaha yang diperkenalkan dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sangat terbatas dibandingkan dengan bank Umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia) melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha pengasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) provinsi.

c. Posisi Strategi Bank Perkreditan Rakyat

Disadari bahwa selama ini sebagian besar pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat

didaerah pedesaan belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan perbankan baik dari aspek pembiayaan maupun penyimpanan dana. Adapun lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat dengan pertimbangan:

- 1) Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan Undang-Undang Perbankan
- 2) Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia.
- 3) Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang di simpan di Bank Perkreditan Rakyat
- 4) Bank Perkreditan Rakyat beralokasi di sekitar Usaha Mikro Kecil dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.
- 5) Bank Perkreditan Rakyat memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjangkau dan melayani Usaha Mikro Kecil dan masyarakat pedesaan.
- 6) Posisi Bank Perkreditan Rakyat yang strategis tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar keberadaan Bank Perkreditan Rakyat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.

2.2. Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

Laporan keuangan menurut M. Faisal Abdullah. (2002;2) dapat dipahami sebagai bentuk pencatatan keuangan secara sistematis dan metodologis tentang posisi keuangan maupun hasil operasi keuangan perusahaan pada suatu periode waktu ke waktu tertentu yang terdiri dari Neraca, laporan Rugi Laba, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan lainnya yang diperlukan dalam analisis

keuangan. Laporan keuangan bank sesuai yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang ditetapkan untuk Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

a. Laporan Bulanan

Laporan bulanan kepada Bank Indonesia merupakan laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan criteria yang telah ditentukan misalnya mengenai batas akhir penyampaian dan format laporannya. Misalnya, laporan keuangan pokok yang mencakup neraca, laba rugi beserta lampirannya, laporan BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit), laporan penerimaan dan penanaman dana dengan Bank lain dan laporan PKM. Keempatnya wajib disampaikan rutin setiap bulan. Format laporan keuangannya berikut ini digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan berkala oleh pengawas Bank Indonesia dan sebagai dasar perhitungan dalam TKB (Tingkat Kesehatan Bank). Laporan keuangan bulanan untuk Bank Indonesia berupa laporan keuangan pokok terdiri dari:

1) Neraca

Bank menyajikan aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Urutan likuiditas secara garis besar akan sama dengan urutan jatuh temponya, pos lancar dan tidak lancar tidak disajikan secara terpisah karena sebagian besar aktiva dan kewajiban suatu bank dapat direalisasikan atau diselesaikan dalam waktu dekat.

2) Laporan laba rugi.

Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang(multiple step) yang menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional.

b. Laporan Semesteran

Merupakan laporan yang harus disampaikan setiap enam bulan sekali meliputi laporan publikasi dan laporan dewan pengawas.

c. Laporan Tahunan

Adalah laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap tahun sekali sesuai batas waktunya masing-masing yaitu laporan rencana kerja tahunan, laporan dewan pengawas tahunan, laporan perkembangan usaha, laporan publikasi tahunan, laporan keuangan tahunan sebelum dan sesudah audit oleh kantor akuntan publik.

2.3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bagi BPR

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644) yang selanjutnya disebut PBI, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

- a. Sesuai dengan Pasal 2 (dua) PBI, BPR diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR.
- b. Modal sebagaimana dimaksud pada angka a) terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
- c. Dana setoran modal sebagai bagian dari modal inti disetorkan oleh pemilik/calon pemilik kepada Bank Perkreditan Rakyat untuk tujuan penambahan modal yang selanjutnya oleh Bank Perkreditan Rakyat ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan" dengan mencantumkan keterangan

"Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia".

- d. Aktiva tetap yang dapat digunakan sebagai setoran modal adalah tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Rasio KPM merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

$$\text{Rasio KPM} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah aktiva yang perhitungannya dilakukan dengan memberikan bobot risiko sebagai berikut :

Jenis AKTIVA	Bobot Risiko
<u>AKTIVA NERACA</u> :	
1. Kas	0 %
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0 %
3. Kredit yang dijamin dengan deposito berjangka & tabungan pada bank ybs.	0 %
4. Giro, deposito, sertif deposito, tabungan serta tagihan lainnya pada bank lain	20 %
5. Kredit kepada bank lain atau pemerintah daerah	20 %
6. Kredit yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah	20 %
7. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni	50 %
8. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh:	
a. BUMD	100 %
b. Perorangan	100 %
c. Koperasi	100 %
d. Perusahaan lainnya	100 %
e. Lain – lain	100 %
9. Aktiva tetap dan inventaris (Nilai Buku)	100 %
10. Aktiva lainnya selain tersebut di atas	100 %

Sumber : M. Faisal Abdullah (2003)

Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal ini terdiri dari modal disetor, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan dan bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Sedangkan modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman

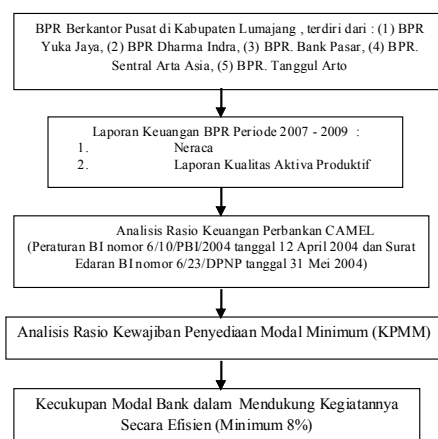
yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal.

2.4. Administrasi Kecukupan Penyertaan Modal Minimum

Mengingat bahwa modal merupakan faktor yang penting bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menampung risiko kerugian, maka pengurus Bank Perkreditan Rakyat harus:

- a. Melaksanakan ekspansi usaha dalam batas-batas yang dapat ditampung oleh permodalan BPR yang bersangkutan.
- b. Selalu memantau kondisi permodalan Bank Perkreditan Rakyat dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, sekurang-kurangnya untuk periode bulanan dengan menggunakan data laporan bulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada lampiran Surat Edaran ini. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Desember 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.5. Kerangka Pemikiran



3. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang keuangan khususnya keuangan perbankan karena variabel yang digunakan merupakan rasio keuangan perbankan dimana untuk menghitungnya diperoleh dari data keuangan bank yang sudah dipublikasikan. Jenis penelitian ini menurut tingkat eksplanasinya merupakan penelitian deskriptif dimana peneliti bermaksud menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2009:206).

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Berkantor Pusat di Kabupaten Lumajang untuk periode 2007 – 2009. Variabelnya yaitu rasio KPM merupakan variabel mandiri, dimana variabel mandiri merupakan variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen yang selalu dipasangkan dengan variabel dependen. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan dan tidak mencari hubungan dengan variabel lain. Oleh karena itu penelitian seperti ini dinamakan penelitian deskriptif. (Emory, 1985 dalam Sugiyono, 2009:54).

Rasio KPM merupakan salah satu rasio dalam alat analisis keuangan perbankan yaitu CAMELS khususnya pada rasio *capital*. Penggunaan rasio penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa rasio ini yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menentukan tingkat kesehatan bank.

3.2. Obyek Penelitian

Penelitian ini diadakan di Bank Perkreditan Rakyat yang kantor pusatnya berada di Kabupaten Lumajang, terdiri dari 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat yaitu :

Bank Perkreditan Rakyat yang Diteliti

No	Nama Bank Perkreditan Rakyat
1	PT. BPR Yuka Jaya
2	PT. BPR Sentral Arta Asia
3	PT. BPR Dharma Indra
4	PD. BPR Bank Pasar
5	PT. BPR Tanggul Arto

Sumber data : Bank Indonesia

3.3. Sumber dan Jenis Data

3.3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data internal yaitu gambaran keadaan intern bank yang bersumber dari data 5 (lima) laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2007-2009. Sedangkan sumber datanya berasal dari Bank Indonesia yang laporan keuangannya telah dipublikasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Neraca dan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya.

3.3.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat tahun 2007-2009 yang dipublikasikan dalam direktori Bank Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Sifat data ini adalah data runtun waktu, yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu.

3.4. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel variabel penelitian sebagai berikut :

Variabel	Indikator	Instrumen	Skala
KPMM	a. Modal (berpedoman pada ketentuan BI tentang Kecukupan Penyertaan Modal Minimum yaitu Modal Inti + Modal Pelengkap) b. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)	Rasio KPMM : <hr/> Modal ATMR	Rasio

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio kecukupan modal akan diketahui kemampuan menyanggah Aktiva Bank Perkreditan Rakyat terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Rasio ini merujuk pada Edaran Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644), yang selanjutnya disebut PBI.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berupa studi kasus, yaitu jenis penelitian yang terperinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya, dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Data yang akan dianalisis adalah data yang tersedia di neraca dan laporan kualitas aktiva produktif yang akan digunakan untuk menghitung rasio KPMM, yang selanjutnya akan digunakan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatannya secara efisien. Tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data tentang modal Bank Perkreditan Rakyat periode 2007-2009 yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang datanya diperoleh dari

- laporan keuangan publikasi neraca.
- b. Mengumpulkan data tentang Aktiva Bank Perkreditan Rakyat dan melakukan perhitungan ATMR dengan cara memberikan (%) bobot persentase resiko pada aktiva, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor. 8/28/DPBPR tentang surat edaran Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 - c. Melakukan perhitungan rasio kecukupan modal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor. 8/28/DPBPR tentang surat edaran Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dengan menggunakan rumus Rasio KPMM.
 - d. Menganalisis hasil perhitungan rasio kecukupan modal masing-masing Bank Perkreditan Rakyat dan kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang secara keseluruhan ditinjau dari rasio kecukupan modal.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Data Penelitian

Sebelum dilakukan perhitungan rasio KPMM maka terlebih dulu dilakukan perhitungan terhadap ATMR dan modal pada 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang. Berikut adalah hasil perhitungan ATMR, Modal dan selanjutnya rekapitulasi perhitungan rasio KPMM periode 2007 – 2009.

a. Hasil Perhitungan ATMR (dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama BPR	Periode		
		2007	2008	2009
1	PT. BPR Yuka Jaya	5.988.961	7.159.375	12.403.671
2	PT. BPR Sentral Arta Asia	32.036.069	36.902.005	40.254.530
3	PT. BPR Dharma Indra	41.859.979	45.786.422	48.282.793
4	PD. BPR Bank Pasar	14.345.998	13.787.750	11.835.258
5	PT. BPR Tanggul Arto	5.331.407	5.471.209	8.538.833

Sumber data : Bank Indonesia

b. Hasil Perhitungan Modal (Modal Inti dan Modal Pelengkap) dalam Ribuan Rupiah

No	Nama BPR	Periode		
		2007	2008	2009
1	PT. BPR Yuka Jaya	967.749	1.379.566	1.606.122
2	PT. BPR Sentral Arta Asia	6.991.194	7.809.126	6.233.575
3	PT. BPR Dharma Indra	5.571.612	6.520.801	7.609.115
4	PD. BPR Bank Pasar	2.181.846	2.390.781	830.437
5	PT. BPR Tanggul Arto	1.827.743	1.968.470	1.410.596

Sumber data : Bank Indonesia

c. Hasil Perhitungan Rasio KPMM

No	Nama BPR	Periode		
		2007	2008	2009
1	PT. BPR Yuka Jaya	16.15 %	19.27 %	12.94 %
2	PT. BPR Sentral Arta Asia	21.82 %	21.16 %	15.48 %
3	PT. BPR Dharma Indra	13.31 %	14.24 %	15.75 %
4	PD. BPR Bank Pasar	15.20 %	17.33 %	7.01 %
5	PT. BPR Tanggul Arto	34.28 %	35.97 %	16.51 %
Rata-rata Rasio Kecukupan Modal		20.15%	21.60%	13.54%

Sumber data : Data Sekunder yang diolah.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. PT. Bank Perkreditan Rakyat Yuka Jaya.

Dari hasil analisis data tentang rasio KPMM pada PT BPR Yuka Jaya dari tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2007 yaitu sebesar 16,15% menjadi 19,27% pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 3,12%, sedangkan pada tahun 2009 menjadi 12,94% mengalami penurunan sebesar 6,33% dari tahun 2008. Kenaikan rasio kecukupan modal dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 3,12% disebabkan karena modal mengalami kenaikan sebesar 42,55% sedangkan ATMR mengalami kenaikan sebesar 19,5%. Kenaikan modal yang lebih besar dari kenaikan ATMR inilah yang membuat rasio KPMM pada tahun 2008 mengalami kenaikan. Sedangkan penurunan rasio KPMM dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 6,33% disebabkan karena modal mengalami kenaikan sebesar 16,42% dan

ATMR mengalami kenaikan sebesar 73,2%. Kenaikan ATMR yang lebih besar dari kenaikan modal inilah yang membuat rasio KPMM tahun 2009 mengalami penurunan.

Dari kondisi ini dapat dijelaskan bahwa kinerja PT. BPR Yuka Jaya periode 2007 sampai 2009 ditinjau dari rasio KPMM mengalami penurunan. Namun penurunan rasio KPMM yang dialami BPR ini masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal 8%. Jadi ditinjau dari rasio KPMM, PT. Bank Perkreditan Rakyat Yuka Jaya masih dalam kinerja yang sehat menurut Bank Indonesia dan kecukupan modalnya mampu mendukung kegiatan operasionalnya secara efisien.

b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia.

Dari hasil analisis data tentang rasio KPMM pada Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia, rasio KPMM dari tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami penurunan. Dari tahun 2007 yaitu sebesar 21.82% menjadi 21.16% pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0.66%, sedangkan pada tahun 2009 menjadi 15.48% mengalami penurunan sebesar 5.68% dari tahun 2008. Penurunan rasio kecukupan modal dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 0.66% disebabkan karena modal mengalami kenaikan sebesar 11.70% tetapi ATMR sebagai pembagi juga mengalami kenaikan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 15.18%. Kenaikan modal yang lebih kecil dari kenaikan ATMR yang terlalu besar sebagai pembagi inilah yang membuat rasio kecukupan modal pada tahun 2008 mengalami penurunan. Sedangkan penurunan rasio KPMM dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 5.68% disebabkan karena modal mengalami penurunan sebesar 20.00 % dan ATMR mengalami kenaikan sebesar 9.08%. Kenaikan ATMR yang lebih besar sebagai pembagi dari penurunan modal inilah yang membuat rasio KPMM tahun 2009

mengalami penurunan.

Dari kondisi ini dapat dijelaskan bahwa kinerja PT. BPR Sentral Arta Asia periode 2007 sampai 2009 ditinjau dari rasio KPMM mengalami penurunan. Namun penurunan rasio KPMM yang dialami Bank Perkreditan Rakyat ini masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal 8%. Jadi ditinjau dari rasio KPMM, PT. Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia masih dalam kinerja yang sehat menurut Bank Indonesia dan kecukupan modalnya mampu mendukung kegiatan operasionalnya secara efisien.

c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra.

Dari hasil analisis data tentang rasio KPMM pada PT Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra dari tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami kenaikan yang cukup baik. Dari tahun 2007 yaitu sebesar 13.31% menjadi 14.24% pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 0.93%, sedangkan pada tahun 2009 menjadi 15.75% mengalami kenaikan sebesar 1.51% dari tahun 2008. Kenaikan rasio KPMM dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 0.93% disebabkan karena modal mengalami kenaikan sebesar 17.03% sedangkan ATMR mengalami kenaikan sebesar 9.37%. Kenaikan modal yang lebih besar dari kenaikan ATMR inilah yang membuat rasio KPMM pada tahun 2008 mengalami kenaikan. Sedangkan kenaikan rasio KPMM dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 1.51% disebabkan karena modal mengalami kenaikan sebesar 16.68% dan ATMR mengalami kenaikan sebesar 5.45%. Kenaikan modal yang lebih besar dari kenaikan ATMR inilah yang membuat rasio KPMM tahun 2009 mengalami peningkatan.

Dari kondisi ini dapat dijelaskan bahwa kinerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra periode 2007 sampai 2009 ditinjau dari rasio KPMM mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan perkembangan usaha bank semakin meningkat dan masih dalam batas

ketentuan Bank Indonesia tentang kecukupan modal bank yaitu minimal 8%. Jadi ditinjau dari rasio KPMM, PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra masih dalam kinerja yang sehat menurut Bank Indonesia dan kecukupan modalnya mampu mendukung kegiatan operasionalnya secara efisien.

d. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Dari hasil analisis data tentang rasio KPMM pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dari tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2007 yaitu sebesar 15.20% menjadi 17.33% pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 2.13%, sedangkan pada tahun 2009 menjadi 7.01% mengalami penurunan sebesar 10.32% dari tahun 2008. Kenaikan rasio KPMM dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 2.13% disebabkan karena modal mengalami kenaikan sebesar 9.57% sedangkan ATMR mengalami penurunan sebesar 4.10%. Meskipun adanya kenaikan modal yang cukup besar tetapi penurunan ATMR yang lebih kecil sebagai pembagi inilah yang membuat rasio KPMM pada tahun 2008 mengalami kenaikan. Sedangkan penurunan rasio KPMM dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 10.33% disebabkan karena modal mengalami penurunan yang drastis sebesar 65.27% dan ATMR juga mengalami penurunan sebesar 15.83%. Penurunan ATMR dan modal yang sangat besar inilah yang membuat rasio KPMM tahun 2009 mengalami penurunan.

Dari kondisi ini dapat dijelaskan bahwa kinerja PD. Bank Pasar periode 2007 sampai 2009 ditinjau dari rasio KPMM mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2007-2008 rasio KPMM BPR ini meningkat dan masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal 8% tetapi pada tahun 2009 rasio kecukupan modalnya dibawah batas ketentuan Bank Indonesia. Jadi ditinjau dari rasio KPMM, PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar

masih dalam kinerja yang sehat menurut Bank Indonesia, tetapi kinerja Bank Pasar pada tahun 2009 ditinjau dari rasio KPMM berada dalam kondisi tidak sehat karena berada di bawah ketentuan Bank Indonesia. Jadi harus lebih ditingkatkan kembali agar standar rasio KPMM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sehingga bank mempunyai kecukupan modal untuk mendukung kegiatannya secara efisien.

e. PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggul Arto.

Dari hasil analisis data tentang rasio KPMM pada PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggul Arto dari tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2007 yaitu sebesar 34.28% menjadi 35.97% pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 1.69%, sedangkan pada tahun 2009 menjadi 16.51% mengalami penurunan sebesar 19.46% dari tahun 2008. Kenaikan rasio KPMM dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 1.69% disebabkan karena modal mengalami kenaikan sebesar 7.70% sedangkan ATMR mengalami kenaikan sebesar 2.62%. Kenaikan modal yang lebih besar dari kenaikan ATMR inilah yang membuat rasio kecukupan modal pada tahun 2008 mengalami kenaikan. Sedangkan penurunan rasio KPMM dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 19.46% disebabkan karena modal mengalami penurunan sebesar 29.65% dan ATMR mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 56.06%. Kenaikan ATMR yang lebih besar dari modal inilah yang membuat rasio KPMM tahun 2009 mengalami penurunan.

Dari kondisi ini dapat dijelaskan bahwa kinerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggul Arto periode 2007 sampai 2009 ditinjau dari rasio KPMM mengalami penurunan. Namun penurunan rasio KPMM yang dialami BPR ini masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal 8%. Jadi ditinjau dari rasio KPMM, PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggul Arto masih dalam kinerja yang sehat menurut

Bank Indonesia dan kecukupan modalnya mampu mendukung kegiatan operasionalnya secara efisien.

Setelah pembahasan kinerja masing-masing Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang, maka berikut akan dibahas mengenai kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang secara keseluruhan ditinjau dari rasio KPMM. Rasio KPMM Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang secara keseluruhan dilihat dari rata-rata rasio KPMM dalam periode 2007 sampai 2009 mengalami fluktuasi yaitu dari tahun 2007 sebesar 20.15% menjadi 21.60 pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 1.45% sedangkan pada tahun 2009 menjadi 13.54% mengalami penurunan sebesar 8.06%. Kenaikan rata-rata rasio KPMM pada tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 1.45% hal ini disebabkan karena KPMM masing-masing Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan yang cukup tinggi sedangkan pada tahun 2008 ke tahun 2009 kenaikan rata-rata rasio KPMM sebesar 13.54% mengalami penurunan sebesar 8.06%. Penurunan ini disebabkan rasio KPMM masing-masing Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan yang drastis, penurunan yang terlihat sangat menonjol pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang rasio KPMM hanya mencapai 7.01% dibawah standar ketentuan modal minimum Bank Indonesia yaitu 8%.

Meskipun secara keseluruhan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan rasio KPMM, tetapi secara rata-rata masih dalam kondisi sehat karena berada di atas ketentuan Bank Indonesia. Berikut adalah grafik rata-rata rasio KPMM Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang periode 2007 -2009.



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- Modal bank yang terlalu tinggi berpengaruh terhadap perolehan laba meskipun pada hakekatnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur modal bank yang sangat kuat. Tetapi modal yang terlalu besar menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan kapasitas dana yang mengganggu atau bank masih mempunyai likuiditas yang terlalu tinggi, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban membayarkan utang. Sedangkan modal bank yang terlalu rendah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya, karena modal digunakan sebagai alat untuk menjamin kelangsungan usaha bank dan menjamin para kreditur yang menyimpan dananya di bank.
- Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di kabupaten Lumajang secara individu maupun keseluruhan ditinjau dari rasio KPMM menunjukkan kinerja yang sehat karena berada di atas ketentuan minimal 8% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari hasil perhitungan, rata-rata rasio KPMM yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Lumajang, selama tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2007, rasio KPMM sebesar 20.15%, tahun 2008 meningkat sebesar 21.60% dan nilai KPMM nya melebihi batas minimal dan pada tahun 2009 rasio KPMM menurun sebesar 13.54% tetapi masih dalam standar ketentuan kecukupan modal minimum Bank Indonesia.

5.2. Saran-saran

- a. Bank Perkreditan Rakyat agar dapat menjaga dan meningkatkan kecukupan modalnya sesuai dengan standar kecukupan modal minimum Bank Indonesia yaitu 8% untuk menjaga agar kelangsungan usaha bank tetap berkembang dan senantiasa memperoleh kepercayaan dari masyarakat, serta mampu mendukung kegiatan operasionalnya secara efisien.
- b. Posisi modal bank dapat mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam pencapaian tingkat laba jika modal bank yang terlalu tinggi berpengaruh kurang baik terhadap perolehan jumlah laba meskipun pada hakekatnya kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa struktur modal bank sangat kuat. Tetapi modal yang terlalu besar dapat menunjukkan bahwa masih adanya kemungkinan kapasitas dana yang masih menganggur (*idle fund*) dengan kata lain bahwa bank masih mempunyai likuiditas yang terlalu tinggi. Berarti terdapat kemungkinan bahwa bank masih kurang ekspansif dalam melakukan penjualan atau kurang ekspansif dalam menyalurkan kreditnya. Disisi lain, modal yang terlalu rendah juga membawa dampak negatif karena akan membatasi ruang gerak usaha bank, juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Karena modal digunakan sebagai alat untuk menjamin kelangsungan usaha bank dan menjamin para kreditur yang menyimpan dananya di bank.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bisa melakukan analisis kinerja Bank Perkreditan Rakyat ditinjau dari rasio lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75. Tentang Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/28/DPBPR tanggal 12 Desember 2006*. Bank Indonesia: Jakarta
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/30/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR*. Bank Indonesia: Jakarta
- Eddie Rinaldy. 2009. *Membaca Neraca Bank*. Cetakan Kedua Revisi. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing
- Diyah wahyu Lestyorini. 2004. *Analisis CAMEL Sebagai Alat Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang*. Skripsi
- Dwi Prastowo. D dan Rika Juliaty. 2008. *Analisa Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Kedua (Revisi). Yogyakarta : UPP AM YKPN.
- Jumingan, 2005. *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasmir, SE. MM. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kasmir, SE. MM. 2001. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- M. Faisal Abdullah, Drs. MM . 2004. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta
- S. Munawir. 2005. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat, Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- S. Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat, Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*, edisi pertama, cetakan kedelapan, CV Alfabeta, Bandung.
- Sofyan Syafri Harahap. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.